



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WAHYU PRIHANTORO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH
3. NHK : 114024

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.556.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/126 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 476.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/52 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 322 m2/52 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>678.000.000</b>
1. MOBIL, NISSAN LIVINA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000		
4. MOTOR, HONDA VARIO HONDA VARIO 160 CC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000		
5. MOTOR, KAWASAKI KAWASAKI NINJA 250 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.500.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>70.997.922</b>



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.313.497.922
III. HUTANG	Rp.	314.353.748
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.999.144.174

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.